



Pendampingan Kelayakan Usaha pada BumKam di Tulang Bawang Lampung

Warsiyah

Universitas Muhammadiyah Lampung

E-mail: warsiyah1281@gmail.com

Abstrak

Program Pendampingan Kelayakan Usaha pada Badan Usaha Milik Kampung (BumKam) di Tulang Bawang Lampung bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengelola dalam aspek manajemen keuangan, strategi pemasaran, dan akses permodalan. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah Participatory Rural Appraisal (PRA) serta pelatihan berbasis praktik yang melibatkan pengelola BumKam secara langsung. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari di Balai Desa Tri Tunggal Jaya dengan peserta dari lima desa, yakni Desa Tritunggal Jaya, Bujuk Agung, Purwa Jaya, Catur Buana, dan DWT Jaya. Hasil pendampingan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pencatatan keuangan, pemanfaatan strategi pemasaran digital, serta keterampilan manajerial pengelola BumKam. Beberapa BumKam yang sebelumnya mengalami stagnasi kini mulai meningkatkan daya saing dan memperluas jangkauan pasar. Dampak ekonomi yang dihasilkan meliputi peningkatan pendapatan usaha, pertumbuhan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PAD), serta terbukanya peluang kemitraan dengan lembaga keuangan dan sektor swasta. Namun, terdapat tantangan dalam implementasi, seperti kesulitan dalam adaptasi teknologi keuangan digital dan keterbatasan sumber daya dalam ekspansi usaha. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan berkelanjutan serta penguatan kolaborasi antara pemerintah desa, pelaku usaha, dan lembaga keuangan untuk memastikan keberlanjutan usaha BumKam.

Kata Kunci: kelayakan usaha; BumKam; Lampung

Abstract

The Business Feasibility Assistance Program for Village-Owned Enterprises (BumKam) in Tulang Bawang Lampung aims to increase the capacity of managers in terms of financial management, marketing strategies, and access to capital. The methods used in this activity are Participatory Rural Appraisal (PRA) and practice-based training involving BumKam managers directly. This activity lasted for two days at the Tri Tunggal Jaya Village Hall with participants from five villages, namely Tritunggal Jaya Village, Bujuk Agung, Purwa Jaya, Catur Buana, and DWT Jaya. The results of the mentoring showed a significant improvement in financial records, the use of digital marketing strategies, and managerial skills of BumKam managers. Some BumKam that previously experienced stagnation are now starting to increase their competitiveness and expand their market reach. The resulting economic impact includes an increase in business income, growth in contribution to Village Original Income (PAD), and the opening of partnership opportunities with financial institutions and the private sector. However, there are challenges in implementation, such as difficulties in adapting digital financial technology and limited resources in business expansion. Therefore, continuous assistance and strengthening collaboration between village governments, business actors, and financial institutions are needed to ensure the sustainability of BumKam's business.

Keywords: business qualification; BumKam; Lampung



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Kampung (BumKam) adalah lembaga ekonomi desa yang dibentuk dan dimiliki oleh pemerintah desa, dikelola secara ekonomis, mandiri, dan profesional dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan potensi lokal. Peran BumKam dalam perekonomian desa sangat signifikan, berfungsi sebagai motor penggerak bagi perekonomian desa, sumber Pendapatan Asli Desa (PADes), dan sarana pendorong kesejahteraan masyarakat desa. Badan Usaha Milik Kampung (BumKam) berperan penting sebagai pilar ekonomi desa, berfungsi sebagai motor penggerak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan potensi lokal secara mandiri. Praktik terbaik dalam pengelolaan BumKam yang sukses melibatkan pengelolaan aset desa/kampung secara efektif.

Dalam mengembangkan perekonomian di wilayah perdesaan, pemerintah membangun lembaga ekonomi berupa BUMDes/Kam, yang berguna dalam mengelola aset desa/kampung. Kelayakan usaha merupakan aspek penting dalam pengembangan BumKam. Konsep kelayakan usaha mencakup berbagai aspek seperti pasar, keuangan, teknis, hukum, dan lingkungan. Indikator utama kelayakan usaha bagi UMKM dan BumKam meliputi analisis pasar yang komprehensif, perencanaan keuangan yang matang, kelayakan teknis operasional, kepatuhan terhadap regulasi hukum, dan dampak lingkungan yang minimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan usaha BumKam antara lain kemampuan manajemen, akses terhadap modal, adaptasi terhadap perubahan pasar, dan dukungan dari pemangku kepentingan lokal.

Namun, dalam operasionalnya, BumKam di Tulang Bawang, Lampung, menghadapi berbagai permasalahan yang menghambat perkembangan usaha mereka. Salah satu tantangan utama adalah manajemen keuangan yang kurang efektif, yang sering kali disebabkan oleh minimnya pemahaman pengelola tentang prinsip-prinsip akuntansi dan pengelolaan keuangan yang baik. Hal ini sejalan dengan temuan (Samigaluh et al., n.d.) yang menunjukkan bahwa pendampingan dalam pengelolaan keuangan dapat meningkatkan kapasitas pengelola BumDes dalam menyusun laporan keuangan yang akurat dan transparan. Selain itu, aspek pemasaran juga menjadi kendala signifikan. BumKam sering kali kesulitan dalam memasarkan produk mereka secara efektif, baik karena kurangnya strategi pemasaran yang

tepat maupun keterbatasan akses ke pasar yang lebih luas. Sebagai contoh, studi oleh (Gani et al., 2022) menyoroti pentingnya sosialisasi dan pendampingan dalam strategi pengembangan BumDes untuk meningkatkan kemampuan pemasaran dan daya saing produk di pasar. Akses terhadap modal juga menjadi permasalahan krusial. Banyak BumKam mengalami kesulitan dalam memperoleh sumber pendanaan yang memadai untuk mengembangkan usaha mereka (Herlinawati et al., 2023). Keterbatasan modal ini sering kali disebabkan oleh kurangnya informasi mengenai sumber pendanaan yang tersedia serta prosedur pengajuan yang kompleks.

Menurut (Abd. Rahman Taher et al., 2023), pendampingan dalam pengelolaan BumDes dapat membantu mengidentifikasi sumber pendanaan alternatif dan memfasilitasi akses modal bagi pengembangan usaha desa. Selain itu, kesenjangan kompetensi sumber daya manusia dalam menjalankan usaha yang berkelanjutan juga menjadi tantangan serius. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola usaha secara profesional menyebabkan banyak BumKam tidak mampu bersaing di pasar yang semakin kompetitif (Salma 2024). Kesenjangan kompetensi dalam menjalankan usaha yang berkelanjutan juga menjadi tantangan yang perlu diatasi. Banyak pengelola BumKam belum memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai dalam manajemen usaha, yang berdampak pada rendahnya efisiensi operasional dan keberlanjutan usaha. (Widyastuti et al., 2021) menekankan bahwa pendampingan pengelolaan BumDes dapat meningkatkan kapasitas pengelola dalam aspek manajerial dan operasional, sehingga mendukung keberlanjutan usaha.

Melihat berbagai permasalahan tersebut, program pendampingan menjadi solusi yang mendesak untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan BumKam. Pendampingan yang komprehensif dapat membantu BumKam dalam mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan yang dihadapi, meningkatkan kapasitas pengelola, serta mengoptimalkan potensi usaha yang dimiliki. Sebagai contoh, (Widyanto, 2024) menunjukkan bahwa pendampingan dalam pengelolaan BumDes dapat meningkatkan kinerja usaha dan kontribusinya terhadap perekonomian desa. Melalui pendampingan, diharapkan BumKam dapat mengatasi berbagai kendala operasional, meningkatkan kapasitas manajerial, dan mengembangkan model bisnis yang berkelanjutan. Dengan demikian, implementasi program pendampingan yang terstruktur dan berkelanjutan menjadi urgensi untuk memastikan

BumKam di Tulang Bawang dapat berkembang secara optimal dan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

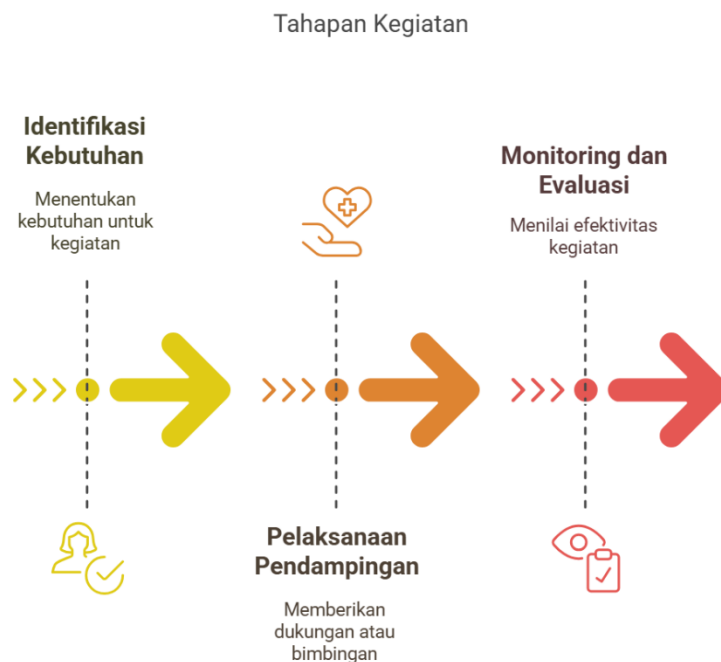
METODE

Pelaksanaan program pendampingan untuk Badan Usaha Milik Kampung (BumKam) di Tulang Bawang, Lampung, dilakukan selama 2 hari pada tanggal 18-19 Desember 2024 bertempat di Balai Desa Tri Tunggal Jaya Kabupaten Tulang Bawang dan di ikuti oleh pengurus masing-masing bumkam dari 5 Desa yakni Desa Tritunggal Jaya, Bujuk Agung, Purwa Jaya, Catur Buana dan DWT Jaya sebanyak 20 peserta. Kegiatan ini dirancang dengan pendekatan dan metode yang komprehensif guna memastikan efektivitas dan keberlanjutan program.

Pendekatan yang digunakan dalam program ini adalah Participatory Rural Appraisal (PRA), sebuah metode yang menekankan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengumpulan informasi dan pengambilan keputusan. Melalui PRA, permasalahan dan potensi yang ada di masyarakat dapat diidentifikasi secara lebih akurat, karena melibatkan perspektif dan pengetahuan lokal. Hal ini sejalan dengan temuan (Nuraini & Hendrawan, 2021) yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam analisis SWOT untuk menentukan strategi pemasaran yang efektif. Selain itu, program ini juga mengimplementasikan metode pelatihan dan workshop yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas pengelola BumKam. Pelatihan ini mencakup berbagai topik, mulai dari manajemen keuangan hingga strategi pemasaran digital. Menurut (Sukarmi et al., 2021), pelatihan yang terstruktur dan relevan dapat membantu UMKM dalam mengembangkan strategi bisnis yang lebih efektif.

Pendampingan dilakukan baik secara individual maupun kelompok, khususnya dalam aspek manajemen keuangan dan pemasaran. Pendekatan ini memungkinkan penyesuaian materi dan metode sesuai dengan kebutuhan spesifik setiap BumKam, serta mendorong berbagi pengalaman dan pembelajaran antar pengelola. (Samigaluh et al., n.d.) menyoroti bahwa pendampingan yang disesuaikan dengan kebutuhan individu atau kelompok dapat meningkatkan efektivitas program pengembangan kapasitas.

Tahapan Kegiatan



Pertama, tahap awal melibatkan survei dan wawancara dengan pengelola BumKam untuk memahami kondisi terkini, tantangan, dan kebutuhan mereka. Selanjutnya, dilakukan analisis SWOT untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi oleh BumKam. (Nisa, 2018) menekankan pentingnya analisis SWOT dalam merumuskan strategi yang tepat bagi usaha mikro.

Kedua, Pelaksanaan Pendampingan. 1) Pelatihan Manajemen Usaha dan Keuangan: Memberikan pemahaman tentang pengelolaan keuangan yang baik, termasuk pencatatan, pelaporan, dan analisis keuangan. 2) Pelatihan Strategi Pemasaran Digital dan Konvensional: Membekali pengelola dengan keterampilan dalam memanfaatkan media digital untuk pemasaran, serta strategi pemasaran tradisional yang efektif. 3) Simulasi Pembuatan Laporan Keuangan Sederhana: Memberikan latihan praktis dalam menyusun laporan keuangan yang mudah dipahami dan informatif. 4) Diskusi dan Konsultasi Bisnis: Sesi interaktif untuk membahas permasalahan spesifik yang dihadapi oleh BumKam dan mencari solusi bersama.

Ketiga, Monitoring dan Evaluasi. Untuk memastikan efektivitas program, dilakukan: 1) Pengukuran Tingkat Pemahaman Peserta: Dilakukan sebelum dan sesudah kegiatan untuk menilai peningkatan pengetahuan dan keterampilan. 2) Observasi Implementasi Materi:

Memantau penerapan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dalam operasional sehari-hari BumKam. 3) Penyusunan Laporan Evaluasi dan Rekomendasi Tindak Lanjut: Menyusun laporan yang mencakup temuan selama program, evaluasi efektivitas, dan rekomendasi untuk perbaikan atau pengembangan lebih lanjut. Pendekatan dan tahapan kegiatan yang terstruktur ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pengelola BumKam, sehingga mereka mampu mengelola usaha dengan lebih efektif dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program pendampingan kelayakan usaha pada Badan Usaha Milik Kampung (BumKam) di Tulang Bawang Lampung menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan dalam aspek pengelolaan usaha dan strategi bisnis. Sebelum pendampingan, mayoritas BumKam di wilayah ini menghadapi berbagai kendala, seperti manajemen keuangan yang kurang tertata, perencanaan bisnis yang belum matang, serta keterbatasan dalam pemasaran produk. Sebagian besar pengelola belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai penyusunan laporan keuangan yang transparan dan akurat, yang berakibat pada kesulitan dalam pengambilan keputusan strategis. Hal ini selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Azizah et al., 2024), yang menyebutkan bahwa kurangnya pemahaman dalam manajemen keuangan menjadi hambatan utama dalam pengelolaan BumDes di berbagai daerah.

Setelah pelatihan dan pendampingan, terjadi perubahan yang cukup signifikan dalam pola pengelolaan usaha BumKam. Para pengelola mulai menerapkan teknik pencatatan keuangan yang lebih sistematis, serta mulai memahami pentingnya perencanaan usaha berbasis data. Selain itu, strategi pemasaran digital yang diperkenalkan dalam pelatihan mulai diimplementasikan secara bertahap, sehingga memungkinkan BumKam untuk memperluas jangkauan pasarnya.

Namun, dalam proses implementasi hasil pendampingan, masih terdapat beberapa tantangan dan hambatan. Beberapa pengelola BumKam mengalami kesulitan dalam mengadaptasi sistem pencatatan keuangan digital karena terbiasa dengan metode manual. Selain itu, keterbatasan modal usaha dan infrastruktur yang belum memadai menjadi kendala dalam ekspansi bisnis yang lebih luas. Beberapa BumKam juga masih mengalami kesulitan

dalam menjalin kerja sama dengan mitra usaha potensial, terutama karena kurangnya jaringan bisnis yang luas.

No	Aspek	Sebelum	Sesudah
1	Managemen Keuangan	Tidak memiliki pencatatan keuangan yang sistematis	Mulai menerapkan pencatatan keuangan berbasis sistem
2	Strategi pemasaran	Hanya mengandalkan pemasaran konvensional	Menggunakan pemasaran digital dan media sosial
3	Kapasitas Pengelola	Terbatas dalam keterampilan manajerial	Meningkatkan pemahaman tentang manajemen bisnis
4	Akses Modal	Sulit mendapatkan pinjaman atau modal tambahan	Mulai menjalin kerja sama dengan lembaga keuangan
5	Daya Saing Produk	Produk kurang dikenal di luar wilayah desa	Produk mulai dikenal di pasar yang lebih



Gambar 1. Pemaparan Materi



Gambar 2. Sesi Diskusi



Gambar 3. Peserta dan Pendamping

Analisis Dampak Kegiatan, antara lain: *Pertama*, Peningkatan Kapasitas Pengelola BumKam. Program pendampingan ini telah memberikan peningkatan yang signifikan dalam kapasitas pengelola BumKam. Sebagian besar peserta mulai memahami pentingnya pencatatan keuangan yang baik, mampu menyusun laporan keuangan sederhana, serta memahami strategi pemasaran yang lebih efektif. Hal ini berkontribusi pada pengelolaan usaha yang lebih profesional dan berorientasi pada pertumbuhan.

Kedua, Dampak Ekonomi bagi Desa. Setelah penerapan hasil pendampingan, beberapa BumKam mulai mengalami peningkatan pendapatan akibat strategi pemasaran yang lebih baik dan jangkauan pasar yang lebih luas. Pendapatan tambahan ini juga berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD), yang kemudian dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan program sosial lainnya.

Ketiga, Prospek Keberlanjutan dan Pengembangan Lebih Lanjut. Keberlanjutan program ini dapat dijamin dengan adanya monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan implementasi yang optimal. Selain itu, penguatan kerja sama antara BumKam dengan mitra bisnis, lembaga keuangan, dan pemerintah desa sangat diperlukan agar pengelola BumKam dapat terus mendapatkan pendampingan dan akses terhadap modal usaha. Dengan strategi yang berkelanjutan, diharapkan BumKam di Tulang Bawang dapat menjadi pilar ekonomi desa yang kuat dan mandiri.

KESIMPULAN

Pelaksanaan program pendampingan kelayakan usaha pada Badan Usaha Milik Kampung (BumKam) di Tulang Bawang Lampung menunjukkan hasil yang positif dalam meningkatkan kapasitas pengelola serta mendorong pertumbuhan ekonomi desa. Sebelum pendampingan, BumKam di wilayah ini menghadapi berbagai tantangan, termasuk manajemen keuangan yang tidak sistematis, pemasaran yang masih bersifat konvensional, keterbatasan akses modal, serta kurangnya keterampilan pengelola dalam manajemen usaha. Program pendampingan yang dilaksanakan melalui pendekatan Participatory Rural Appraisal (PRA) dan metode pelatihan berbasis praktik terbukti efektif dalam mengatasi berbagai kendala tersebut. Setelah pelaksanaan kegiatan, terjadi peningkatan signifikan dalam beberapa aspek utama. Pengelola BumKam mulai menerapkan sistem pencatatan keuangan yang lebih terstruktur, menggunakan strategi pemasaran digital untuk memperluas jangkauan pasar, serta menjalin kerja sama dengan lembaga keuangan untuk mendapatkan akses modal yang lebih baik. Program ini juga berhasil meningkatkan kapasitas manajerial pengelola dalam perencanaan usaha dan pengambilan keputusan berbasis data.

Namun, terdapat beberapa tantangan yang masih dihadapi dalam implementasi program ini. Beberapa pengelola BumKam mengalami kesulitan dalam mengadopsi teknologi pencatatan keuangan digital karena keterbatasan akses dan pengalaman dalam menggunakan perangkat lunak. Selain itu, meskipun pemasaran digital telah diperkenalkan, belum semua pengelola memiliki keterampilan dalam menciptakan konten pemasaran yang menarik. Keberlanjutan program juga masih menjadi tantangan, terutama dalam hal pendampingan jangka panjang dan dukungan dari berbagai pihak terkait. Dari segi dampak ekonomi, program ini memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat desa. Dengan adanya peningkatan kapasitas pengelola, BumKam mampu meningkatkan pendapatan yang berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD). Peningkatan ekonomi ini juga berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat desa, dengan lebih banyak peluang kerja yang tercipta serta peningkatan akses terhadap layanan dasar.

Saran

Untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program ini, terdapat beberapa saran yang dapat diterapkan: *Pertama*, Peningkatan Pendampingan Berkelanjutan. Program pendampingan tidak boleh berhenti setelah pelatihan awal, tetapi perlu diikuti dengan monitoring dan bimbingan teknis secara berkala. Pemerintah desa dan mitra akademisi dapat terus berkolaborasi dalam mendampingi pengelola BumKam agar dapat menerapkan strategi yang telah dipelajari. *Kedua*, Penguatan Literasi Digital dan Keuangan. Mengingat masih adanya kesulitan dalam adopsi teknologi keuangan dan pemasaran digital, program pelatihan lanjutan perlu difokuskan pada literasi digital dan keuangan. Pengenalan aplikasi akuntansi sederhana serta teknik pemasaran berbasis media sosial harus lebih diperluas agar pengelola BumKam lebih siap menghadapi persaingan. *Ketiga*, Kolaborasi dengan Lembaga Keuangan dan Sektor Swasta. Akses permodalan masih menjadi kendala utama bagi banyak BumKam. Oleh karena itu, sinergi antara BumKam dengan bank syariah, koperasi, dan lembaga keuangan mikro harus diperkuat untuk memberikan solusi pembiayaan yang lebih mudah diakses dan sesuai dengan kebutuhan mereka. *Keempat*, Diversifikasi Usaha dan Penguatan Produk Lokal. Untuk meningkatkan daya saing dan memperluas pasar, BumKam perlu didorong untuk melakukan diversifikasi usaha berdasarkan potensi lokal yang ada. Selain itu, pengembangan produk berbasis inovasi serta peningkatan kualitas produk juga menjadi hal yang penting untuk menarik minat pasar yang lebih luas. *Kelima*, Pembuatan Model Bisnis yang Berkelanjutan. BumKam perlu didorong untuk menyusun model bisnis yang lebih matang dan berorientasi pada keberlanjutan. Model bisnis ini harus mencakup perencanaan jangka panjang, strategi ekspansi pasar, serta skema investasi yang memungkinkan pertumbuhan usaha secara progresif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Taher, Syamsul, Nurhadi, & Nurlailah. (2023). Pendampingan dalam BUMdes (Badan Usaha Milik Desa) Desa Ampera Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 6(4), 380–387. <https://doi.org/10.56338/jks.v6i4.3472>
- Azizah, N., Wibowo, D. S. D., Andriyani, S., & ... (2024). Peningkatan Manajemen Keuangan Melalui Aplikasi Kas Digital Berbasis Android Pada Umkm Batik Tulis Lasem Jawa Tengah. *Jurnal Abdi* <http://abdiinsani.unram.ac.id/index.php/jurnal/article/view/1292>

- Gani, M. H., Thamrin, T., & Akbar, T. (2022). Pelatihan Batik Dan Manajemen Kewirausahaan Bagi Masyarakat Di Kabupaten Sawahlunto Sijunjung. *Jurnal Abdimas Ilmiah* <http://jurnalilmiahcitrabakti.ac.id/jil/index.php/jailcb/article/view/979>
- Herlinawati, E., Aulia Hilmiawan, G., Pratiwi, N., Subroto, M. R. S., Handayani, A. P., & Thoyyiba, M. R. (2023). Improving Understanding of Digital Financial Literacy for Pondok Pesantren Anwar Futuhiyyah Students. *Proceeding International Conference of Community Service, 1*(1), 91–96. <https://doi.org/10.18196/iccs.v1i1.6>
- Nisa, K. (2018). Jurnal Karya Pengabdian Dosen dan Mahasiswa. *Strategi Pemasaran Online Dan Offline*, 01(1), 27. <https://www.ejournal.indrainstitute.id/index.php/ikhlas/article/download/1165/570>
- Nuraini, F. U., & Hendrawan, A. (2021). Pengaplikasian Teknik Eco Print dengan Memanfaatkan Kulit Jengkol. *E-Proceeding of Art & Design* , 8(6), 3861–3872.
- Samigaluh, K., Progo, K. K., Faiz, I. A., Zamzami, F., Natasari, D., & Wulandari, R. (n.d.). *Pendampingan Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa , Desa*.
- Sukarmi, Kurniaty, R., Dewantara, R., & Ikaningtyas. (2021). Re-Evaluasi Pengaturan Mengenai Digitalisasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Peningkatan Daya Saing di Era Ekonomi Digital. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 10, 880–896. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2021.v10.i04.p16>
- Widyanto, I. (2024). *Pendampingan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Simpang Kubu Kandang*. 4(1), 37–40. <https://ejurnal.umri.ac.id/index.php/ABDIMASSOSIORA/article/download/7253/2939>
- Widyastuti, R. D., Risal, R., & Sari, W. (2021). Pendampingan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Maju Jaya di Desa Rasau Jaya Tiga Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya. *Surya Abdimas*, 5(2), 70–80. <https://doi.org/10.37729/abdimas.vi.919>